

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Tahar dan Sandy (2016) menggunakan metode riset dengan melakukan *survey* pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Teknik pengambilan sampel adalah *non probability sampling* dengan teknik *convenience sampling*, yakni dengan memilih sampel yang datanya paling mudah diperoleh dan peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah (Indriantoro dan Supomo, 1999). Teknik pengumpulan sampel yakni dengan membagikan kuesioner kepada responden. Teknik analisis data menggunakan uji kualitas data, analisis regresi berganda, uji nilai t, uji nilai f, analisis koefisien determinasi. Dengan kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak atas pelayanan KPP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak maka hal itu akan memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi pajak memang sangat dibutuhkan, setelah dilakukan wawancara dengan beberapa responden, mereka menyatakan bahwa tidak begitu memahami tentang sanksi perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Pengetahuan wajib pajak atas penghasilan kena pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak tentang perhitungan pajak maka akan mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Warouw, dkk (2016) merupakan *explanary research* yang akan membuktikan hubungan kausal antara variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan, dengan variabel terikat yaitu kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang di kuantitatifkan dengan skala likert. Teknik analisa data menggunakan korelasi dan determinasi, uji F, analisis regresi linier berganda, uji T. Dengan kesimpulan secara parsial sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Manado dan Bitung. Secara parsial sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Manado dan Bitung. Secara simultan sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Manado dan Bitung.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih (2016) menggunakan pendekatan deskriptif korelasional. Data diperoleh dengan memberikan angket atau kuesioner pada responden. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis. Dengan kesimpulan penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dan Sukartha (2014) data diperoleh dengan memberikan kuesioner. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan uji instrumen (uji validitas dan reliabilitas) dan uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedasitas) untuk memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke analisis regresi linear berganda. Dengan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel tanggung jawab moral, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Supadmi (2014) data diperoleh dengan memberikan kuesioner. Teknik analisis data penelitian menggunakan uji instrumen (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (uji multikolinearitas dan uji heteroskedasitas) dan analisis regresi linear berganda. Kesimpulan pada penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, kesadaran, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Artinya peningkatan sistem pemeriksaan yang dilakukan fiskus, peningkatan kesadaran yang didukung oleh semakin besarnya pengetahuan perpajakan Wajib Pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam membayar dan menyampaikan SPT di KPP Madya Denpasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di kota padang. Pemilihan sampel dengan metode proposional

sampling . Jenis data yang digunakan adalah data subyek, dan sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pajak

Pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro (1990:5) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Sugianto pajak adalah suatu pungutan atau iuran wajib yang dilakukan oleh individu atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, dapat untuk dipaksakan dengan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku yang kemudian digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah serta untuk pembangunan daerah.

a. Fungsi Pajak

Pajak sangat memiliki peranan yang signifikan di dalam Negara. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran dalam pembangunan.

Menurut Sumarsan (2012) Fungsi pajak ada dua:

a) Pajak sebagai sumber dana atau penerimaan (budgetair).

Pajak berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat ke dalam kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.

b) Pajak sebagai pengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi.

2. Wajib Pajak Badan

a. Pengertian Badan

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

b. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

c. Pajak Penghasilan Badan

Pada pasal 1 UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Adapun subjek dari PPH Badan yaitu :

1. Wajib Pajak Badan dalam negeri.

Wajib Pajak Badan dalam negeri yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

2. Wajib Pajak Badan luar negeri.

Wajib Pajak Badan luar negeri yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan menurut Devano dan Rahayu (2006) merupakan ketaatan. Tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Secara umum kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di suatu Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RII92/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan meliputi:
 - a) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir,
 - b) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan berturut-turut,
 - c) SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh
 - a) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b) Tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- c. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut harus:
 - a) Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*)
 - b) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiskal bagi Waji Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

4. Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Dalam

undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

a. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP.

Menurut Sri (2003) sanksi administrasi dikenakan apabila:

1. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
2. Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.
3. Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan yang dihitung saat tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terhutang.

Waluyo (2007:424) mengatakan sanksi pidana diatur sebagai berikut:

1. Barang siapa karena kelalaiannya tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang.
2. Barang siapa dengan sengaja:
 - a. Tidak menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak.
 - b. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar.
 - c. Memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar.
 - d. Tidak memperlihatkan dokumen lain.
 - e. Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terutang.

5. Kesadaran Pajak

Menurut Gozali (dalam Utomo 2002) kesadaran adalah rasa rela untuk melakukan sesuatu sebagai kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari

dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan.

Menurut Sumarso (dalam Jatmiko 2006), bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah dan kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam hal pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006).

6. Pemahaman Peraturan Pajak

Menurut Stanton (dalam Riko 2006) menjelaskan bahwa pemahaman merupakan salah satu faktor psikologis dalam kegiatan belajar. Memahami maksudnya dan menangkap makna adalah tujuan akhir dari setiap belajar. Seseorang yang memahami sesuatu harus melewati dan kemudian harus meningkatkan kualitas pengetahuannya tersebut, diiringi dengan pendalaman maknanya. Pemahaman memiliki arti yang sangat mendasar yang melekatkan bagian-bagian belajar pada proporsinya. Menurut Riko (2006:75), tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui.

Masalah tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Spicer dan Lundsant (dalam Razman 2005), jika

pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajiban pajaknya, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia sendiri tidak memahami UU dan tata cara perpajakan.

7. *E-filing*

a. Pengertian dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *realtime* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online realtime*, sehingga wajib pajak tidak perlu melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

E-filing berdasarkan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 bertujuan untuk:

1. Mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. DJP telah mengeluarkan peraturan mengenai *e-filing* yaitu Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (*e-filing*) melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

2. Wajib Pajak tidak lagi harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak apabila sudah menggunakan *e-filing* sehingga membuat penyampaian SPT lebih cepat dan mudah. Hal ini dikarenakan pengiriman data SPT dapat dilakukan dimana dan kapan saja dan dikirim langsung ke *database* DJP dengan fasilitas yang disalurkan melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk langsung oleh DJP.

3. *E-filing* ini mempermudah dalam penyampaian SPT dan memberikan keyakinan kepada wajib pajak bahwa SPT yang dilaporkan sudah benar diterima oleh DJP dan keamanan jauh lebih terjamin.

b. Layanan *e-filing*

Dalam peraturan DJP Nomor PER-1/PJ/2014 *e-filing* melayani penyampaian dua jenis SPT, yaitu:

1. SPT Tahunan PPh WP OP Formulir 1770S. Digunakan bagi WP OP yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Contoh karyawan, PNS, TNI, POLRI, serta pejabat negara lainnya yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara atau pengajar atau pelatih dan lain-lain.

2. SPT Tahunan PPh WP OP Formulir 1770SS. Formulir ini digunakan oleh WP OP yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000 pertahun (pekerjaan satu atau lebih pemberi kerja).

c. Alat dan Tata Cara Penggunaan *e-filing*

Berdasarkan peraturan DJP Nomor PER-1/PJ/2014 meliputi:

1. Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)

ASP adalah perusahaan yang telah ditunjuk oleh DJP yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik langsung ke DJP.

2. Surat permohonan memperoleh *e-fin*:

Surat permohonan memperoleh *e-fin* adalah surat yang diajukan oleh wajib pajak sebagai permohonan untuk melakukan *e-filing*

3. *E-fin* atau *electronic filing identification number*:

E-fin adalah nomor identitas yang diberikan oleh KPP tempat terdaftar kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan *e-filing*. *E-fin* ini tidak sama dengan Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4. *Digital Certificate*

Sebuah sertifikat berbentuk digital yang diberikan oleh DJP untuk kepentingan pengamanan data SPT. Sertifikat ini mirip dengan sertifikat yang diberikan oleh pihak yang berkompeten untuk menjamin validitas transaksi saat melakukan pembayaran secara *online*. Sertifikat ini digunakan untuk proteksi data SPT dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga hanya bisa dibaca oleh sistem tertentu (dalam hal ini sistem penerimaan SPT ASP dan DJP) dengan nama dan NPWP tertentu juga.

5. *E-spt*

Surat pemberitahuan tahunan yang berbentuk formulir elektronik yang merupakan pengganti lembar manual SPT. *E-SPT* ini tersedia untuk berbagai jenis laporan dan dapat diperoleh di KPP dimana wajib pajak terdaftar.

6. Bukti penerimaan *e-spt*

Bukti penerimaan SPT yang dikirimkan lewat ASP secara *online*. Fungsinya sama dengan bukti penerimaan SPT secara *offline*.

Tata cara penggunaan *e-filing* berdasarkan peraturan DJP Nomor PER-1/PJ/2014 sebagai berikut:

1. WP yang akan menyampaikan SPT Tahunan secara *e-filing* melalui website DJP harus memiliki *e-fin*.

2. WP yang sudah mendapatkan *e-fin*, harus mendaftarkan diri paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya *e-fin* untuk terdaftar sebagai wajib pajak *e-filing* melalui website DJP. Pendaftaran dilakukan melalui website DJP dengan mencantumkan *e-mail* dan nomor *handphone* untuk pengiriman kode verifikasi dan notifikasi dan bukti pengiriman elektronik. *E-fin* yang sudah diperoleh tetapi WP yang sudah mendapatkan *e-fin* tersebut tidak mendaftarkan diri sampai batas waktu yang ditentukan *e-fin* tersebut tidak dapat digunakan lagi, sehingga WP harus mendaftarkan diri lagi untuk mendapatkan *e-fin* yang baru.

3. WP yang telah terdaftar sebagai WP *e-filing* melalui website DJP dapat menyampaikan SPT dengan cara mengisi *e-spt* dengan benar, lengkap, dan jelas. WP yang telah mengisi *e-spt* kemudian meminta kode verifikasi melalui website DJP. Kode verifikasi berlaku sebagai tanda tangan elektronik. Hasil pengisian aplikasi *e-spt* dianggap lengkap apabila seluruh elemen data digitalnya telah diisi.

4. *E-spt* dinyatakan lengkap oleh DJP, wajib pajak diberikan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPT Tahunan. Bukti peneriman disampaikan kepada WP melalui *e-mail*.

5. WP mendapatkan notifikasi setiap menyampaikan SPT Tahunan secara *e-filing* melalui *website* DJP.

6. Keterangan atau dokumen lain terkait SPT Tahunan tidak perlu disampaikan pada saat penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing* tetapi wajib disimpan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

7. Penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing* melalui *website* DJP dapat dilakukan setiap saat dengan standar Waktu Indonesia Barat.

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Jika pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajiban pajaknya, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia sendiri tidak memahami UU dan tata cara perpajakan, hal ini akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak rendah (Syahril, 2013). Memahami peraturan diharapkan dapat memunculkan kesadaran diri yang tinggi bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak patuh dengan sukarela (Pratiwi, 2015). Pemahaman perpajakan meliputi pengisian surat pemberitahuan dengan benar, penghitungan pajak yang sesuai dengan pajak yang terutang yang ditanggung oleh wajib pajak, menyetorkan pajak secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan dan pelaporan atas pajaknya ke kantor

pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut, maka semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

H₁: Tingkat Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010). Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Munari (2005) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Soemarso dalam Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

H₂: Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mardiasmo dalam Mutia (2014) mengatakan sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma

perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Undang-undang di Indonesia menjelaskan bagaimana sanksi perpajakan diterapkan untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh dan mematuhi segala ketentuan perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi pidana (penjara atau kurungan) dan sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan). Menurut Nugroho (2006), sanksi perpajakan yang diterapkan secara tegas oleh pemerintah akan membuat wajib pajak patuh karena mereka sadar akan adanya hukum perpajakan dan konsekuensi apabila melanggar hukum tersebut berupa kerugian secara material.

H₃: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

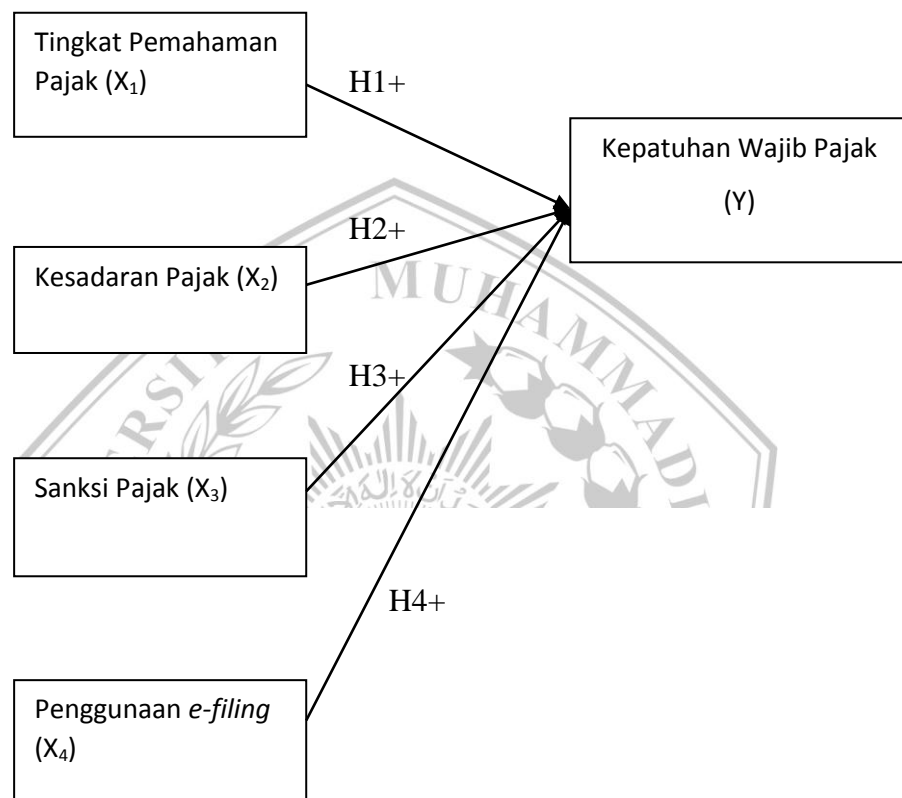
4. Pengaruh Penggunaan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu upaya untuk melaksanakan modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yakni dengan menerapkan sistem *e-filing*. Sistem *e-filing* merupakan suatu sistem penyetoran atau penyampaian surat pemberitahuan baik SPT Masa maupun SPT Tahunan secara elektronik melalui jasa penyedia aplikasi yang telah bekerjasama sama dengan Direktorat Jendral Pajak dengan proses yang terintegrasi dan real time (Viraqh, 2014). Dengan adanya *e-filing* ini wajib pajak tidak lagi mempunyai alasan untuk tidak melaporkan kewajiban pajaknya dengan alasan sibuk dan tidak sempat untuk datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga wajib pajak akan lebih patuh untuk melaporkan pajaknya dengan adanya *e-filing* ini.

H₄: Penggunaan *E-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai konsep untuk menjelaskan serta mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti, agar lebih sederhana maka dibuat kerangka pemikiran seperti gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Model Penelitian Empiris